



No. Katalog : 4103.71

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SULAWESI UTARA 2003



BPS

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI SULAWESI UTARA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SULAWESI UTARA TAHUN 2003

I S B N : 979.488.462.8

No Publikasi : 71520.0401

Katalog BPS : 4103.71

Ukuran Buku : 21 x 29 cm

Jumlah Halaman : 35 Halaman

N a s k a h : Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Gambar Kulit : Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara

KATA PENGANTAR

Dalam kerangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan di era otonomi saat ini Pemerintah Daerah khususnya, lebih mengoptimalkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Optimalisasi potensi daerah pada hakekatnya akan bermuara pada tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat, karena masyarakat disamping sebagai subjek pembangunan juga adalah objek pembangunan. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara sebagai penyedia data menerbitkan Indikator Kesejahteraan rakyat Propinsi Sulawesi Utara tahun 2003.

Publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedianya data, untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan yang luas itu dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Bidang-bidang itu adalah Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan pola konsumsi serta Perumahan dan Lingkungan.

Sumber data mutahir yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada hasil Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan data sekunder lainnya (Sulawesi Utara Dalam Angka).

Kepada Semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga publikasi ini dapat diterbitkan, serta kritik dan saran, disampaikan terima kasih.

Manado, Agustus 2004
Kepala Badan Pusat Statistik
Propinsi Sulawesi Utara

Drs. JASA BANGUN, MSi
NIP. 340 005 025

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
1. KEPEDUDUKAN.....	1
2. KESEHATAN.....	5
3. PENDIDIKAN.....	10
4. KETENAGAKERJAAN.....	16
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	20
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN.....	23

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1 Jumlah dan Laju pertumbuhan penduduk tahun 1980 – 2000	1
1.2 Persentase dan kepadatan penduduk kabupaten/kota tahun 2003	3
1.3 Komposisi penduduk dan angka ketergantungan tahun 2001 – 2003	4

KESEHATAN

2.1 Rata-rata lama sakit per kabupaten/kota tahun 2002 – 2003.....	6
2.2 Persentase pertolongan persalinan pertama bayi tahun 2002 – 2003.....	7
2.3 Persentase penduduk yang berobat sendiri menurut jenis pengobatan yang digunakan.. Menurut kabupaten/kota tahun 2002 – 2003.....	8
2.4 Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat tahun 2002–2003....	9

PENDIDIKAN

3.1 Angka melek huruf per kabupaten/kota tahun 2003.....	11
3.2 Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2003.....	12
3.3 Angka partisipasi sekolah menurut usia sekolah tahun 2003.....	13
3.4 Ratio murid dan guru serta guru dan sekolah tahun 2003/2004.....	15

KETENAGAKERJAAN

4.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka tahun 2002-2003.....	16
4.2 Komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2002-2003.....	18
4.3 Komposisi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tahun 2002-2003.....	18
4.4 Persentase pekerja menurut jam kerja tahun 2002-2003.....	21

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1	Pengeluaran rata-rata nominal dan persentase pengeluaran makanan dan bukan makan Sebulan yang lalu tahun 2002-2003.....	21
-----	--	----

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1	Persentase rumah tangga menurut indikator kualitas perumahan tahun 2002-2003.....	24
6.2	Persentase rumah tangga menurut fasilitas perumahan tahun 2002-2003.....	26

<http://sulut.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Tingkat pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara tahun 1980-2000.....	2
2. Angka beban ketergantungan tahun 2001-2003.....	4
3. Rata-rata lama sakit tahun 2002-2003.....	6
4. Angka melek huruf per kabupaten/kota tahun 2003.....	11
5. Persentase penduduk usia kerja menurut pendidikan tahun 2003.....	12
6. Ratio murid terhadap Guru dan Guru terhadap sekolah tahun 2003/2004.....	15
7. TPAK dan pengangguran terbuka tahun 2002-2003.....	16
8. Persentase pekerja menurut jam kerja tahun 2002-2003.....	19
9. Persentase pengeluaran makanan dan bukan makanan tahun 1999 dan 2002.....	21
10. Persentase indikator kualitas perumahan tahun 2002-2003.....	23
11. Persentase fasilitas rumah tangga tahun 2002-2003.....	26

1. KEPENDUDUKAN

Masalah Kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan nasional jika berkualitas rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2000 jumlah penduduk Sulawesi Utara yang bertempat tinggal tetap sudah mencapai 2,044 juta jiwa, Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhan relatif mengalami penurunan diantaranya melalui program KB. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi secara langsung akan menambah jumlah penduduk usia muda, dan dapat menimbulkan suatu permasalahan baru

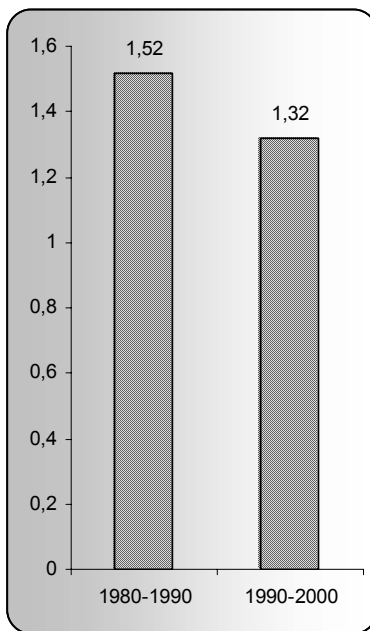
Tabel. 1.1 Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Laju Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
1980	1.973	
1990	1.998	1,52
2000	2.044	1,32

Sumber : Sensus Penduduk

Secara absolut jumlah penduduk Sulawesi Utara terus bertambah setiap tahunnya, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk terus menurun. Selama periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk Indonesia sudah dibawah 2 persen pertahun yaitu rata-rata mencapai 1,52 persen, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.973 juta jiwa pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 1,998 juta jiwa pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian jumlah penduduk Sulawesi Utara sudah mencapai 2.004 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun 1,32 persen antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Sulawesi Utara dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan

Gambar.1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Sulawesi 1980 - 2000



Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 sudah menyajikan 5 Kabupaten/Kota di mana Gorontalo sudah terpisah dengan Sulawesi Utara dengan membentuk satu propinsi sendiri. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun pada periode 1990-2000 per Kabupaten/Kota sangat bervariasi, berdasarkan hasil Provil Kependudukan Sulawesi Utara tahun 2000 pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Sangihe Talaud yaitu sebesar 0,05 persen sedangkan yang tertinggi terdapat di Kota Bitung yaitu sebesar 2,96 persen. Selain Kota Bitung beberapa Kabupaten/Kota mengalami laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi di atas 1 persen, yaitu Kota Manado (1,57 persen), dan Kabupaten Bolaang Mongondow (1,48 persen).

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penyebaran penduduk antara Kabupaten dan Kota tampak masih sangat timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang

umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja di daerah Kota. Masalahnya yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah Kota harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak menimbulkan urbanisasi.

Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di Kota, dengan luas hanya 3,02 persen dari seluruh luas wilayah daratan Sulawesi Utara, dihuni sekitar 26,9 persen penduduk Sulawesi Utara.

Di Sulawesi Utara tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi terdapat di Kota Manado yaitu per Km dihuni oleh 2.613 Jiwa dan yang paling rendah ada di Kabupaten Bolaang Mongondow per Km hanya dihuni oleh 55 Jiwa

Tabel 1.2 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2003

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km)
(1)	(2)	(3)
Bolaang Mongondow	21,52	54,80
Minahasa	38,91	197,63
Sangihe Talaud	12,67	119,10
Manado	19,31	2.612,85
Bitung	7,59	474,77
Sulawesi Utara	100,00	15.272,16

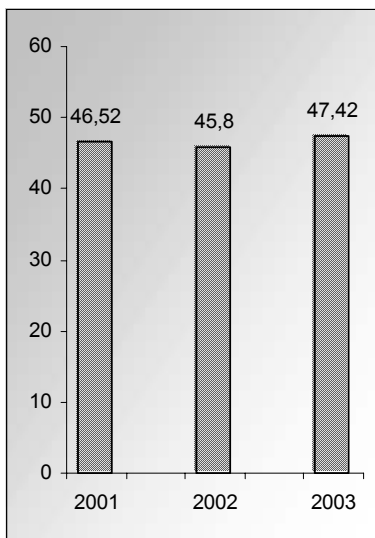
Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak

produktif (kelompok umur 0 - 14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan.

Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2001-2003 di Sulawesi Utara angka beban ketergantungan hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Struktur umur penduduk Sulawesi Utara berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) kurang dari 30 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang 6 persen. Proporsi penduduk usia 0-14 tahun ada sebanyak 26,00 persen pada tahun 2001 naik menjadi 27,35 persen pada tahun 2003. Sedangkan untuk penduduk usia 65 tahun atau lebih tahun 2001 hanya 5,75 persen dan turun menjadi menjadi 4,91 persen pada tahun 2003.

Gambar 2 Angka Beban Ketergantungan 2001-2003



Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2001-2003

Tahun	0-14	15-64	65+	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	26,00	68,25	5,75	46,52
2002	26,36	68,59	5,06	45,80
2003	27,35	67,74	4,91	47,42

Sumber : Susenas

2. KESEHATAN

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

Rata-rata lama hari sakit di Sulawesi Utara pada tahun 2003 ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2002.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

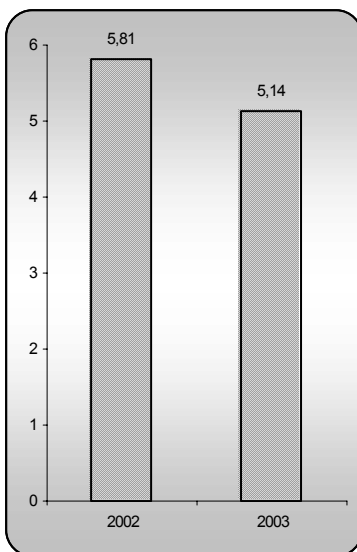
Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan salah satu indikatornya dapat dilihat rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-harinya. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa rata-rata lamanya sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-harinya, di Sulawesi Utara cenderung menurun pada tahun 2003 dibandingkan tahun 2002, yaitu dari 5,81 menjadi 5,14 hari. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kesehatannya sudah semakin membaik. Jika dilihat per Kabupaten/Kota sangat berfluktuasi ada yang meningkat ada pula yang menurun dibandingkan dengan tahun 2002, yang mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Sangihe Talud yaitu 5,72 naik menjadi 5,73 dan 6,94 menjadi 7,29 hari. Sedangkan yang mengalami penurunan rata-rata lama sakit yaitu Kabupaten Minahasa yang cukup

signifikan penurunannya yaitu 6,31 tahun 2002 turun menjadi 4,65 pada tahun 2003 disamping Kota Manado dan Kota Bitung

Tabel 2.1 Rata-rata lama sakit per Kabupaten/Kota tahun 2002 -2003

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama sakit	
	2002	2003
(1)	(2)	(3)
Bolaang Mongondow	5,72	5,73
Minahasa	6,31	4,65
Sangihe Talaud	6,94	7,29
Manado	4,87	4,60
Bitung	5,43	4,65
Sulawesi Utara	5,81	5,14

Gambar 3 Rata-rata Lama Sakit 2002-2003



Sumber Susenas

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Dan hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang di upayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Pada tahun 2002 di Sulawesi Utara terdapat 81,38 persen persalinan pertama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kemudian menurun pada tahun 2003 menjadi 79,36 persen. Penurunan yang cukup signifikan ini terjadi pada tenaga kesehatan dokter yaitu dari 23,73 persen tahun 2002 turun menjadi 19,43 persen tahun 2003 namun untuk tenaga kesehatan bidan mengalami peningkatan dari 55,56 persen tahun 2002 menjadi 56, 72.

persen tahun 2003 begitu juga dengan tenaga kesehatan lainnya dari 2,09 persen menjadi 3,21 persen

Sebaliknya secara umum persalinan pertama yang dibantu oleh bukan tenaga kesehatan dalam hal ini dukun, keluarga dan famili lainnya, pada tahun 2003 meningkat dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu dari 18,62 persen naik menjadi 20,64 persen.

Tabel 2.2 Persentase Penolong Persalinan pertama Bayi Tahun 2002-2003

Indikator	2002	2003
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	81,38	79,36
Dokter	23,73	19,43
Bidan	55,56	56,72
Lainnya	2,09	3,21
Bukan tenaga kesehatan	18,62	20,64
Dukun Tradisionil	15,89	15,49
Lainnya	2,73	5,15

Persentase pertolongan pertama oleh tenaga Kesehatan dan bukan tenaga kesehatan bagi persalinan bayi di Sulawesi Utara tahun 2003 ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2002 terutama untuk tenaga Dokter, namun untuk tenaga bidan dan tenaga kesehatan lainnya ada peningkatan

Sumber : Susenas

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Selama periode 2002-2003 di Sulawesi Utara (Tabel 2.3) penduduk yang berobat sendiri, pengobatan secara modern menjadi pilihan utama, hal ini terlihat pada persentase penduduk yang berobat dengan menggunakan pengobatan modern dibandingkan dengan menggunakan obat tradisional dan lainnya baik tahun 2002 dan 2003 sangat tinggi walaupun dibandingkan dengan tahun 2002 ada sedikit penurunan dari 89,42 persen menjadi 87,97 persen begitu juga dengan menggunakan pengobatan lainnya dari 11,65 persen turun menjadi 10,02 persen sebaliknya untuk menggunakan pengobatan tradisional

meningkat sedikit dari 20,72 persen pada tahun 2002 menjadi 21,88 persen pada tahun 2003. Sementara dilihat per kabupaten/Kota hanya kota Manado yang ada cenderung menurun dari tahun 2002 dibandingkan dengan dengan tahun 2003 yang berobat sendiri dengan semua jenis pengobatan dimana untuk pengobatan tradisional dari 19,55 persen turun menjadi 7,24 persen, pengobatan modern dari 92,51 persen menjadi 91,32 sedangkan pengobatan lainnya dari 7,49 persen turun menjadi 5,31 persen.

Tabel. 2.3 Persentase Penduduk yang berobat sendiri menurut jenis pengobatan yang digunakan menurut kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Tradisional		Modern		Lainnya	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bolaang Mongondow	26,94	44,79	90,61	74,58	19,34	21,87
Minahasa	13,22	19,14	92,68	91,56	7,91	8,76
Sangihe Talaud	43,18	38,90	67,82	83,84	18,62	7,87
Manado	19,55	7,24	92,51	91,32	7,49	5,31
Bitung	11,75	5,05	93,68	97,63	6,77	3,73
Sulawesi Utara	20,72	21,88	89,42	87,97	11,65	10,02

Sumber : Susenas

Sedangkan penduduk yang berobat jalan, menurut jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk tabel 2.3 untuk tahun 2002 yang paling tinggi dipilih oleh masyarakat adalah Puskesmas/Pustu sebesar 42,93 persen walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2003 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 24,18 persen. disusul dengan dokter praktek 30,41 persen sedangkan dibandingkan dengan tahun 2003 ada kenaikan sedikit menjadi 31,57 persen dan tenaga kesehatan inilah yang paling banyak diminati oleh

masyarakat untuk berobat jalan pada tahun 2003, dan yang paling sedikit dipilih masyarakat untuk berobat jalan tahun 2002 adalah mereka yang mempergunakan parakterk tradisional antara lain dukun hanya 0,50 persen namun jika dibandingkan dengan tahun 2003 ada kenaikan menjadi 2,24 persen. Sedangkan tempat berobat yang paling kecil digunakan masyarakat untuk berobat jalan pada tahun 2003 yaitu klink/KIA/BP hanya 1,71 walaupun ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2002 hanya 0,55 persen.

Persentase yang berobat jalan dengan menggunakan fasilitas kesehatan dokter praktek masih cukup dominan bagi masyarakat Sulawesi Utara untuk menangani akan kesehatannya pada tahun 2003 yaitu sebesar 31,57 persen

Tabel. 2.4 persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat tahun 2002-2003

Tempat Berobat	2002	2003
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	6,52	14,30
Praktek Dokter	30,41	31,57
Puskesmas/ Pustu	42,93	24,18
Klinik KIA/ Balai Pengobatan	0,55	1,71
Petugas Kesehatan	19,09	18,04
Praktek Tradisional	0,50	2,24
Lainnya	0,00	2,96

Sumber : Susenas

3 PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan dibidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Karena belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain karena faktor kemiskinan keluarga. Sebagai upaya untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan pendidikan antara lain terlihat dari usaha Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), yang menghimpun dana dari masyarakat untuk membantu keluarga miskin agar anak mereka tetap memperoleh pendidikan.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan sampai saat ini masih terus melanjutkan program wajib belajar 6 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Persentasi angka melek huruf di Sulawesi Utara tampaknya laki-laki lebih tinggi yaitu 99,07 persen dibandingkan dengan perempuan yaitu 98,94 persen

Tingkat Pendidikan

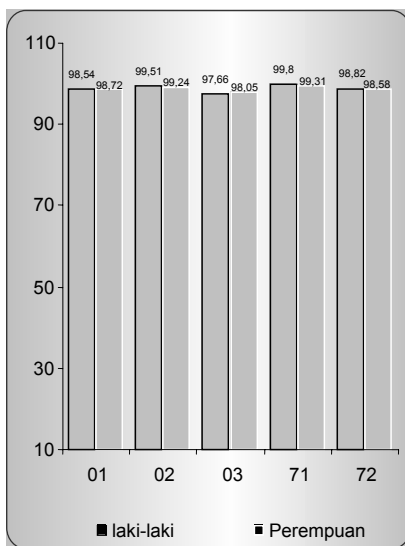
Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat

membaca huruf latin dan huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin di Sulawesi Utara pada tahun 2003 sudah mencapai 99,01 persen, sisanya sebanyak 0,99 persen adalah penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Per Kabupaten/Kota Tahun 2003

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	98,54	98,72	98,63
Minahasa	99,51	99,24	99,38
Sangihe Talaud	97,66	98,05	97,85
Manado	99,80	99,31	99,55
Bitung	98,82	98,58	98,67
Sulawesi Utara	99,07	98,94	99,01

Gambar.4 Angka melek huruf Per kabupaten 2003

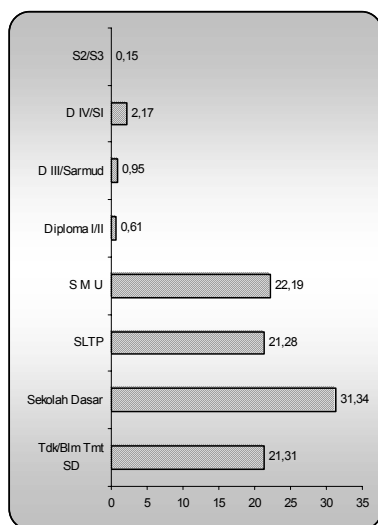


Sumber : Susenas 2003

Dilihat per jenis kelamin, angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2003 sebesar 99,07 persen lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan 98,94 persen. Kondisi ini tidak berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Sangihe Talaud yang memperlihatkan perempuan yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan laki-laki yaitu 98,54 persen dan 98,72 persen di Kabupaten Bolang Mongondow dan 97,66 persen dan 98,05 persen untuk kabupaten Sangihe Talaud. Jika secara total per per kabupaten/Kota yang paling tinggi angka melek huruf terdapat di Kota Manado yaitu sebesar 99,55 persen sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Sangihe Talaud sebesar 97,85 persen.

Dunia pendidikan di Sulawesi Utara masih menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah keluhan mengenai soal saran dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Gambar 5. Persentase Penduduk 10 tahun keatas menurut Pendidikan tahun 2003



Sedangkan gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang SLTP sampai tingkat Diploma IV/SI/S2/S3 masih berada dibawah 50 persen yaitu 47,35 persen dengan kata lain di Sulawesi Utara bahwa persentase penduduk 10 tahun keatas masih di dominasi oleh tamatan Sekolah Dasar.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun keatas Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2003

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	20,40	22,27	21,31
Sekolah Dasar	30,71	32,01	31,34
SLTP	22,12	20,40	21,28
Sekolah Menengah	22,69	21,64	22,19
Diploma I/II	0,40	0,82	0,61
Diploma III/Sarmud	0,97	0,94	0,95
Diploma IV/SI	2,53	1,80	2,17
S2/S3	0,18	0,12	0,15
J u m l a h	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2003

Secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh semua jenjang pendidikan penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, kecuali tingkat Pendidikan Sekolah Dasar dan Diploma I/II dimana perempuan masih lebih tinggi sedikit dibandingkan oleh laki-laki.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun pada tahun 2003 telah mencapai 97,38 persen. usia 13-15 tahun 83,91 persen dan usia 16-18 tahun 45,68 persen

Angka partisipasi sekolah usia 7 – 12 tahun atau usia sekolah dasar Sulawesi Utara cukup tinggi yaitu 97,38 persen atau hanya 2,62 persen usia 7 -12 tahun yang belum yang belum berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah dasar.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah Tahun 2003

Menurut Usia Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Laki – Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12 Tahun	97,57	97,15	97,38
13 – 15 Tahun	78,58	89,51	83,91
16 – 18 Tahun	48,46	42,80	45,68

Sumber : Susenas 2003

Secara umum angka partisipasi sekolah Laki-laki dan perempuan hampir berimbang untuk usia 7-12 tahun, kecuali untuk usia 16-18 laki - laki 48,46 persen dan 42,80 persen untuk perempuan.

Fasilitas Pendidikan

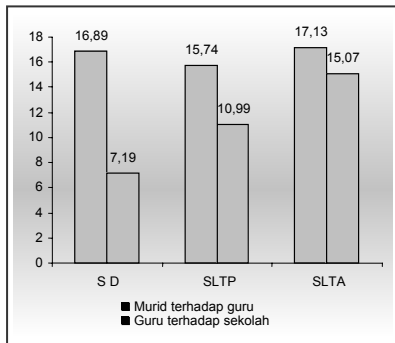
Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung ruang kelas, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah terutama pada daerah terpencil, dan merehabilitas gedung-gedung SD dan SLTP dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Guru dan Sekolah merupakan faktor-faktor penentu didalam keberhasilan dalam pendidikan. Pada tabel 3.4. digambarkan ratio murid terhadap guru, dan Guru terhadap sekolah. Dengan semakin kecil ratio murid terhadap Guru dan semakin besar ratio Guru terhadap sekolah merupakan suatu indikasi mulai efektifnya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Dilihat dari jenjang pendidikan di Sulawesi Utara untuk tahun ajaran 2003/2004 ratio Murid terhadap Guru maka untuk tingkat SLTP adalah yang paling kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan SLTA dimana 1 orang guru mengawasi sekitar 16 murid sedangkan, untuk jennjang Sekolah Dasar 1 orang guru mengawasi 17 orang Siswa dan untuk Jenjang SLTA 1 orang guru mengawasi 18 orang Siswa. Sedangkan dilihat dari ratio Guru terhadap Sekolah di setiap jenjang pendidikan, maka di jenjang pendidikan Sekolah Dasar distribusi tenaga guru lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SLTP dan SLTA yaitu hanya 7 orang guru dalam 1 Sekolah Dasar sedangkan untuk SLTP dan SLTA diantar 10 – 15 orang guru dalam 1 jenjang pendidikan.

Tabel 3.4 Ratio Murid - Guru dan Guru - Sekolah Tahun 2003/2004

Jenjang Pendidikan	Ratio Murid dan Guru	Ratio Guru dan Sekolah
(1)	(2)	(3)
S D	16,89	7,19
S L T P	15,74	10,99
S L T A	17,13	15,07

Gambar 6 Ratio murid terhadap guru dan guru terhadap sekolah tahun 2003/2004



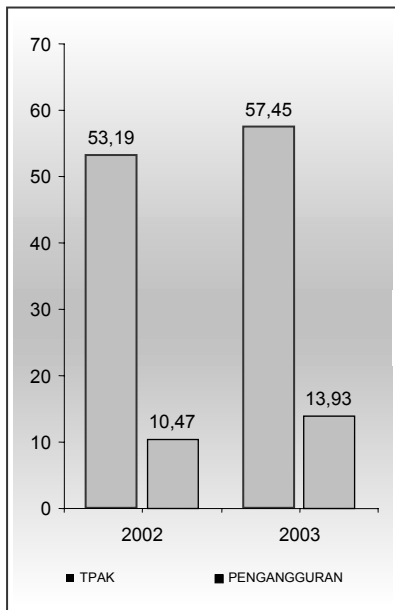
Sumber : Sulut Dalam Angka 2003

<http://sulut.bps.go.id>

4 KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Di Sulawesi Utara, usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah usia 10 tahun atau lebih. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2003, jumlah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas tercatat sebesar 1,738 juta orang yang termasuk angkatan kerja ada sebanyak 998.615 orang.

Gambar 7. TPAK dan pengangguran Terbuka tahun 2002 dan 2003



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Tabel 4.1 menyajikan peningkatan TPAK selama tahun 2000-2002.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2002 - 2003

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Pengangguran Terbuka	
	2002	2003	2002	2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bolaang Mongondow	51,36	56,23	9,28	14,45
Minahasa	54,96	59,70	9,16	12,13
Sangihe Talaud	50,20	55,95	8,03	13,45
Manado	52,84	55,25	14,58	17,12
Bitung	55,23	57,46	14,18	14,97
Sulawesi Utara	53,19	57,45	10,47	13,93

Sumber : Susenas

Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa TPAK di Sulawesi Utara sudah mencapai 57,45, berarti ada peningkatan dibandingkan tahun 2002 hanya 53,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja tahun 2003 lebih tinggi partisipasinya dalam kegiatan ekonomi dibandingkan tahun 2002 dan hal ini berlaku juga jika dilihat per daerah tingkat II. Yang tertinggi Kabupaten Minahasa 59,70 dan terendah ada di kota Manado sebesar 55,25 persen.

Merupakan suatu hal yang umum, bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja diikuti dengan peningkatan yang memadai pada permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja. Sebagai hasilnya, sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan atau akan menjadi pengangguran. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada periode 2002-2003 tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 10,47 persen menjadi 13,93 persen. Kondisi ini berlaku sama disemua daerah tingkat II yang ada dan yang paling tinggi terdapat di Kota Manado sebesar 17,12 persen dan yang terendah ada Kabupaten Minahasa sebesar 12,13.

Sektor pertanian masih memiliki dominan yang cukup tinggi oleh masyarakat Sulawesi Utara sebagai tempat bekerja baik untuk tahun 2002 dan 2003 disusul sektor perdagangan

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Sulawesi Utara masih dapat digolongkan sebagai daerah agraris, hal ini tercermin pada sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dan terhadap pembentukan produk domestik Regional Bruto (PDRB) relatif masih dominan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian meningkat, dari tahun 2002 ke 2003 yaitu dari 47,13 persen menjadi 50,21 persen. kemudian diikuti oleh proporsi penduduk sektor perdagangan, walaupun ada penurunan pada tahun 2003 dibandingkan tahun 2002 yaitu 17,52 persen turun menjadi 16,73 persen, begitu juga dengan proporsi yang bekerja di sektor jasa turun dari 15,60 menjadi 14,79 persen.

Tabel 4.2 Komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2002-2003

Menurut Lapangan Usaha	2002	2003
(1)	(3)	(4)
Pertanian	47,13	50,21
Pertambangan dan galian	0,55	0,83
Industri	5,53	3,71
Listrik Gas dan Air	0,36	0,24
Konstruksi	5,00	5,46
Perdagangan	17,52	16,73
Komunikasi	6,74	6,59
Keuangan	1,55	1,38
Jasa	15,60	14,79
Lainnya	0,02	0,05

Sumber Susenas

Dilihat dari komposisi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaa buru/karyawan yang paling dominan dalam jenis pekerjaan yang ada di Sulawesi Utara pada tahun 2003 yaitu 32,28 persen diikuti oleh mereka yang berusaha sendiri yaitu 31,07 persen.

Tabel 4.3 menyajikan distribusi persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan. Berdasarkan Susenas 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa proporsi penduduk beumur 10 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan berkurang dari 36,66 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 32,28 persen pada tahun 2003.

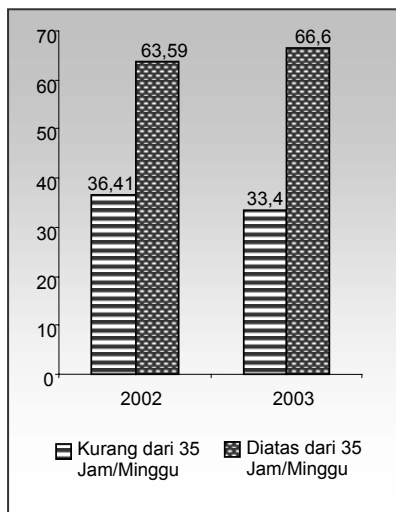
Tabel 4.3 Komposisi penduduk yang bekerja menurut Status Pekerjaan 2002-2003

Menurut Jenis Pekerjaan Usaha	2002	2003
(1)	(3)	(4)
Berusaha Sediri dibantu pekerja		
Tak dibayar	15,99	16,41
Berusaha Dibantu Buruh Dibayar	4,45	4,05
Buruh/Karyawan	36,66	32,28
Pekerja Bebas Pertanian	1,05	3,27
Pekerja Bebas Non Pertanian	1,47	1,80
Pekerja Tak Dibayar	12,52	11,13

Sumber : Susenas

Namun untuk mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas menunjukkan peningkatan, baik untuk pertanian maupun Non Pertanian, terutama untuk pekerja bebas pertanian yang mengalami peningkatan dari 1,05 persen tahun 2002 menjadi 3,27 persen. Selain itu, proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang bekerja dengan cara berusaha dengan dibantu oleh pekerja dibayar, serta proporsi penduduk pekerja tak dibayar cenderung menurun pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002.

Gambar 8. Persentase Pekerja menurut Jam Kerja tahun 2003



Jumlah Jam Kerja

Sebagian besar pekerja di Sulawesi Utara pada tahun 2003 bekerja dengan jam kerja normal, yaitu 35 jam atau lebih seminggu, bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2002 ada peningkatan hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 menunjukkan kenaikan dari 63,59 persen menjadi 66,60 persen, pada tahun 2003, walaupun demikian hal ini berindikasi bahwa di Sulawesi Utara untuk tahun 2003 proporsi penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu atau setengah pengangguran sebesar 33,40 persen, menurun dari 36,41 persen pada tahun 2002

Tabel. 4.4 Persentase Pekerja Menurut Jam Kerja

J a m Kerja	2002	2003
(1)	(2)	(3)
Kurang dari 35 Jam/Minggu	36,41	33,40
Diatas dari 35 Jam/Minggu	63,59	66,60

Sumber Susenas

5 TARAF DAN POLA KONSUMSI

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dari tahun - tahun ada peningkatan terlihat bahwa persentase pola konsumsi makanan menurun sebaliknya persentase pola konsumsi non makanan meningkat dimana pada tahun 1999 sebesar 64,68 persen menurun menjadi 60,19 persen tahun 2002.

Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

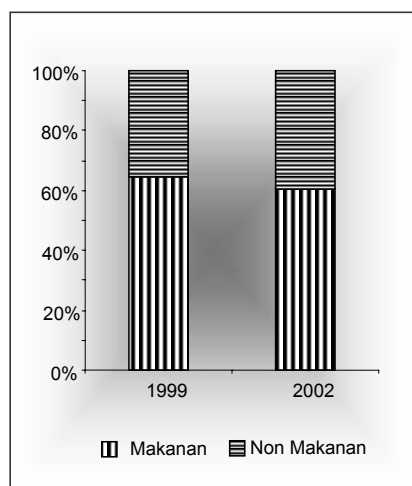
Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan 1997 menyebabkan merosotnya kemampuan daya beli penduduk. Ini disebabkan peningkatan pengeluaran per kapita lebih rendah dibandingkan peningkatan laju inflasi yang mencapai sekitar 90 persen selama tahun 1997-1998. Walaupun sudah mulai menuju kearah perbaikan, namun dampak krisis ekonomi ini ternyata masih terasa sampai saat ini, terlebih lagi dengan terus meningkatnya harga berbagai barang dan jasa.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari

pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, diman perubahan komposisinya digunakan sebagai perubahan tingkat kesejahteraan.

Gambar 9. Persentase pengeluaran Makanan dan bukan Makanan.



Tabel 5.1 Pengeluaran rata-rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan bukan Makanan sebulan yang lalu.

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Pekapita Sebulan			
	Nominal		Persentasi	
	1999	2002	1999	2002
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	98.857	132.879	64,68	60,19
Non Makanan :				
Perumahan	23.293	38.104	15,24	17,26
Barang dan Jasa	14.062	21.961	9,20	9,95
Pakaian	9.981	13.276	6,53	6,01
Barang Tahan Lama	3.745	8.183	2,45	3,71
Lainnya	2.894	6.377	1,90	2,88
J u m l a h	152.832	220.780	100,00	100,00

Sumber : Susenas

Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa persentasi pengeluaran untuk makanan pada tahun 2002 lebih kecil dari pada tahun 1999. Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 1999 terhitung 64,68

persen turun menjadi 60,19 persen pada tahun 2002 sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada tahun 2002 lebih tinggi dibandingkan tahun 1999.

Hal ini dapat memberikan arti bahwa tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2002 lebih baik dibandingkan tahun 1999 karena pendapatan yang diperoleh sepenuhnya bukan lagi sepenuhnya diperuntukan untuk konsumsi makanan, akan tetapi sudah bergeser pada konsumsi bukan atau non makanan. Dan dari gambaran tabel tersebut kenaikan cukup signifikan terjadi pada konsumsi non makanan lebih khusus pada kelompok perumahan sebesar 2,02 persen dibandingkan tahun 1999.

<http://sulut.bps.go.id>

6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

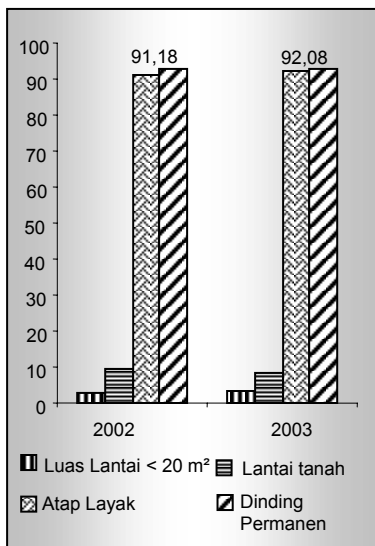
Dalam sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh atau berlindung, baik dari hujan maupun dari panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitasnya yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumah tangga dan juga tempat penampungan kotoran akhir.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya, sehingga kondisi kesehatan perumahan sangat berperan sebagai media penularan penyakit diantara anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

Gambar 10 Persentase indikator kualitas perumahan tahun 2002-2003



Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2002 dan 2003

Indikator Kualitas Perumahan	2002	2003
(1)	(2)	(3)
Persentase Rumah Tangga dengan		
1. Luas Lantai < 20 m ²	2,64	3,16
2. Lantai tanah	9,30	8,25
3. Atap Layak	91,18	92,08
4. Dinding Permanen	92,97	92,99

Sumber : Susenas

Pada tahun 2003 tercatat 3,16 persen rumah tangga di Sulawesi Utara yang tinggal dirumah yang relatif sempit, yaitu kurang dari 20 m²/rumah tangga. Dibandingkan dengan tahun 2002 justru mengalami peningkatan dari 2,64 persen rumah tangga yang tinggal dalam luas lantai yang sempit itu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan perumahan cenderung menunjukkan adanya penurunan. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, rumah tangga tersebut sebahagian besar

berada di kota Manado 4,63 persen, dan Kota Bitung merupakan yang paling kecil yaitu 2,25 persen.

Selain dari luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari pada rumah tangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Karena lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Pada tahun 2003 tercatat sebesar 8,25 persen rumah tinggal di Sulawesi Utara masih menggunakan tanah sebagai lantainya. Jika dilihat dari tahun 2002 terjadi penurunan angka sebesar 1,05 persen.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tinggal dengan atap yang layak dan dinding permanen. Pada tahun 2003 rumah tinggal di Sulawesi Utara yang tinggal dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) tercatat sebesar 92,08 persen atau hanya 7,92 persen rumah tinggal yang ada di Sulawesi Utara beratap daun-daunan. dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan 91,18 persen atau naik sebesar 0,90 persen. Sedangkan rumah tinggal dengan dinding permanen tercatat sebesar 92,99 persen.

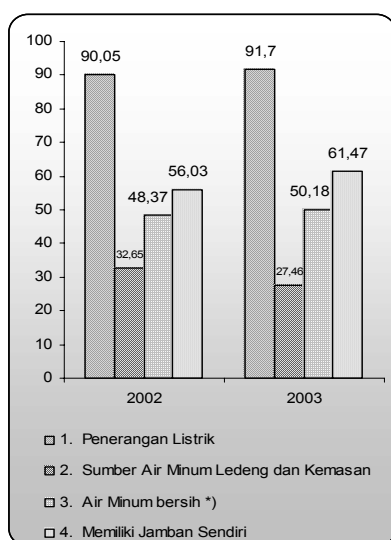
Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggal adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Pada tahun 2003 tercatat sebesar 91,70 persen rumah tinggal di Sulawesi Utara telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, bahkan dibandingkan dengan tahun 2002 ada peningkatan sedikit dari

90, 05 persen hal ini dapat dilihat dalam tabel 6.2. Sedangkan Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah

Tabel 6. 2 Persentase Rumah Tangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan Tahun 2002 dan 2003

Gambar 11 Persentase fasilitas rumah tangga tahun 2002-2003



Indikator Fasilitas Perumahan	2002	2003
(1)	(2)	(3)
Persentase Rumah Tangga dengan :		
1. Penerangan Listrik	90,05	91,70
2. Sumber Air Minum Ledeng dan Kemasan	32,65	27,46
3. Air Minum bersih *)	48,37	50,18
4. Memiliki Jamban Sendiri	56,03	61,47

Catatan : *) Sumber dari Pompa, Sumur/Mata Air terlindung yang jaraknya ke tempat pembuangan Limbah > 10 M
Sumber : Susenas

Pada tahun 2003 rumah tangga di Sulawesi Utara yang menggunakan air ledeng termasuk air kemasan baru mencapai 27,46 persen, bahkan dibandingkan dengan tahun 2002 ada penurunan cukup signifikan sekitar 5,19 persen, sehingga hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah terutama bagi instansi terkait agar lebih memperhatikan kebutuhan air minum yang bersumber dari air ledeng tersebut, Sementara rumah tangga pengguna air bersih yang bersumber dari pompa, sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 m, pada tahun 2003 tercatat sebesar 50,18 persen hal ini ada peningkatan jika dibanding dengan tahun 2002 hanya sebesar 48,37 persen.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Dari tahun ke tahun rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 tercatat sebesar 56,03 persen rumah tangga di Sulawesi Utara yang mempunyai jamban sendiri dengan tangki septik, kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 61,47 persen. hal ini merupakan suatu gambaran adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fasilitas-fasilitas tersebut untuk kesehatan lingkungan.